

# Penyelarasan dengan Alam

Laporan CDP Asia Tenggara 2022

Maret 2023

Ucapan terima kasih khusus untuk



**south pole**

# Daftar isi

- 3 Baik untuk alam, baik untuk iklim**
- 4 Sekilas tentang pengungkapan**
- 6 Gambaran umum pengungkapan**
- 9 Tema pengungkapan – kesalingbergantungan alam**
  - 9 Perubahan Iklim
  - 15 Hutan
  - 20 Keamanan pasokan air
  - 25 Ringkasan pengungkapan berdasarkan tema alam
- 26 Langkah selanjutnya**
- 27 Lampiran**
- 28 Hubungi Kami**

## **Pemberitahuan Penting**

Isi laporan ini dapat digunakan oleh siapa pun dengan mencantumkan CDP Worldwide (CDP) sebagai sumbernya. CDP tidak memberikan izin untuk mengemas ulang atau menjual kembali data yang dilaporkan kepada CDP atau penulis yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Jika hendak mengemas ulang atau menjual kembali isi laporan ini, Anda harus memperoleh izin dari CDP terlebih dahulu.

CDP tidak memberikan pernyataan atau jaminan (secara lisan ataupun tulisan) mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi dan pendapat yang dimuat dalam laporan ini. Anda tidak dapat bertindak atas dasar informasi dan pendapat yang dimuat dalam publikasi ini jika tidak disertai saran profesional yang kompeten. Selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, CDP tidak akan menerima atau menanggung kewajiban, tanggung jawab, atau tugas untuk menangani segala konsekuensi yang timbul ketika Anda atau siapa pun bertindak, atau menahan diri untuk bertindak, berdasarkan informasi dalam laporan ini, atau atas segala keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Semua informasi dan pendapat yang disajikan oleh CDP dalam laporan ini didasarkan penilaian saat laporan ini dibuat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya karena faktor ekonomi, politik, industri, atau alasan khusus dari perusahaan. Komentar dari para kontributor yang dicantumkan dalam laporan ini mencerminkan pendapat penulisnya, dan komentar tersebut bukan merupakan bentuk dukungan dari mereka.

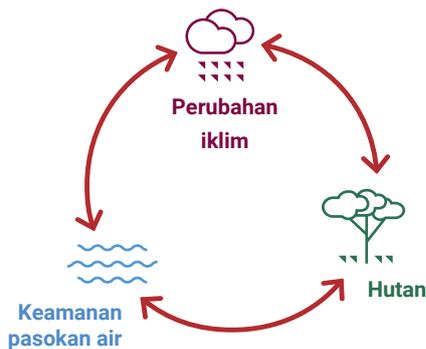
CDP, perusahaan atau perusahaan anggota afiliasinya, ataupun pemegang saham, anggota, mitra, kepala, direktur, pejabat, dan/atau karyawan mungkin memiliki sekuritas pada perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan di beberapa negara bagian atau negara tertentu, dan belum tentu sesuai untuk semua jenis investor, mengingat nilai dan pendapatan yang dihasilkan dari sekuritas tersebut dapat berfluktuasi dan/atau dipengaruhi nilai tukar mata uang.

'CDP' merujuk pada CDP North America, Inc., organisasi nirlaba dengan status amal 501(c)3 di Amerika Serikat, serta CDP Worldwide, badan amal terdaftar (nomor 1122330) dan perusahaan terbatas jaminan (company limited by guarantee) dengan nomor 5013650 yang terdaftar di Inggris.

© 2023 CDP Worldwide. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# Baik untuk alam, baik untuk iklim

**Apa yang terjadi di Asia Tenggara akan berdampak pada dunia. Asia Tenggara tidak hanya memiliki keanekaragaman budaya, tetapi juga keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kawasan ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, termasuk ekosistem laut yang mencakup 30% terumbu karang dunia, sepertiga hutan bakau dunia<sup>1</sup> dan hampir 15% hutan tropis dunia<sup>2</sup>. Namun, Asia Tenggara juga merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. PBB memperkirakan Asia Tenggara akan mengalami kerugian ekonomi hingga sekitar 86,5 miliar dolar AS per tahun akibat bencana alam<sup>3</sup>. Suhu bumi mengalami peningkatan lebih dari satu derajat Celsius (1°C) di atas tingkat praindustri akibat meningkatnya emisi karbon, dan angka ini diperkirakan akan terus melambung. Asia Tenggara merupakan contoh nyataketerkaitan antara alam dan iklim, dan kita harus bertindak cepat dan tegas untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Asia Tenggara.**



Modal alam yang dikelola Asia Tenggara memberikan peluang besar untuk aksi iklim. Mempertahankan tutupan hutan dan reforestasi dapat meningkatkan penyerapan karbon dan memulihkan jasa ekosistem yang diperkirakan akan berkurang. Keamanan pasokan air akan memperkuat ketahanan dan ketangguhan hutan, serta meningkatkan jasa ekosistem yang disediakannya. Mitigasi perubahan iklim akan membantu meningkatkan keamanan pasokan air, mengurangi dampak bencana alam yang menyebabkan kerusakan luas (tidak hanya terhadap mata pencaharian, tetapi juga habitat alami keanekaragaman hayati). Dengan kata lain, jika alam dikelola dengan lebih baik, maka kondisi iklim juga akan menjadi lebih baik. Tindakan

kolektif juga harus dilakukan. Pemerintah, investor, perusahaan, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Aksi global untuk mencapai emisi nol-bersih dan melindungi lingkungan dan sumber daya alami sangat jauh dari mencukupi. Pada tahun 2022, sebanyak 482 perusahaan di seluruh Asia Tenggara telah melaporkan data terkait aksi iklimnya kepada CDP, tetapi hanya 123 perusahaan yang mengungkapkan data terkait keamanan pasokan air dan 35 perusahaan yang mengungkapkan data terkait hutan. Selain Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures/TCFD), pada tahun 2021, bersamaan dengan Konferensi Penandatanganan ke-26 (COP26) Konvensi Kerangka PBB terkait Perubahan Iklim (UNFCCC), Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures/TNFD) dibentuk untuk mempercepat respons yang lebih menyeluruh. Aksi bersama untuk melindungi dan mempertahankan alam merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Di sisi lain, jumlah pengungkapan lingkungan semakin bertambah, tindakan yang dilakukan masih belum mencukupi dan urgensinya juga perlu ditingkatkan.

<sup>1</sup> Loke, M. C. (2014). Sustainable Development of Southeast Asia's Marine Ecosystems – Climate Change Challenges and Management Approaches. [Chou2014Int\\_Conf\\_Mar\\_Sci\\_Aquac.pdf \(nus.edu.sg\)](#)

<sup>2</sup> Estoque, R., et al. (2019). The future of Southeast Asia's forests. [The future of Southeast Asia's forests | Nature Communications](#)

<sup>3</sup> United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). (2020). The Disaster Riskscape across South-East Asia: Key Takeaways for Stakeholders. ST/ESCAP/2885.

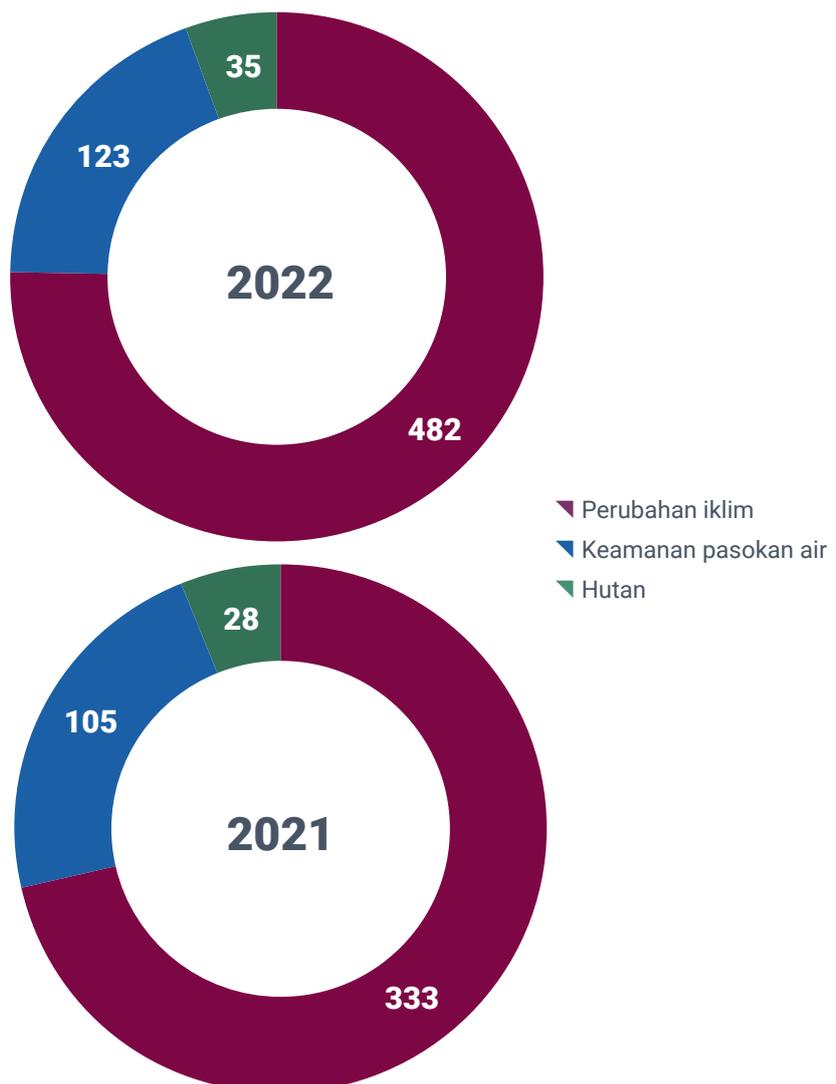
Berbagai alasan melatarbelakangi kurangnya aksi yang dilakukan, bahkan, dengan adanya kerangka dari Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (International Sustainability Standards Board/ISSB) guna penyesuaian standar pengungkapan oleh berbagai pemangku kepentingan yang akan dirilis di masa mendatang--tetap tidak dapat memberikan justifikasi terkait kurangnya aksi yang dilakukan. Dalam laporan ini, kami menyoroti kondisi alam dan perubahan iklim di Asia Tenggara saat ini, serta tindakan yang kami harap dapat diwujudkan setelah Anda membaca laporan ini. Kami yakin laporan ini akan mendorong Anda untuk bertindak lebih, dan tindakan yang Anda ambil untuk wilayah Asia Tenggara akan mendorong dunia untuk bertindak lebih baik lagi.

**CDP and South Pole**  
Asia Tenggara dan Oseania

# Sekilas tentang Pengungkapan

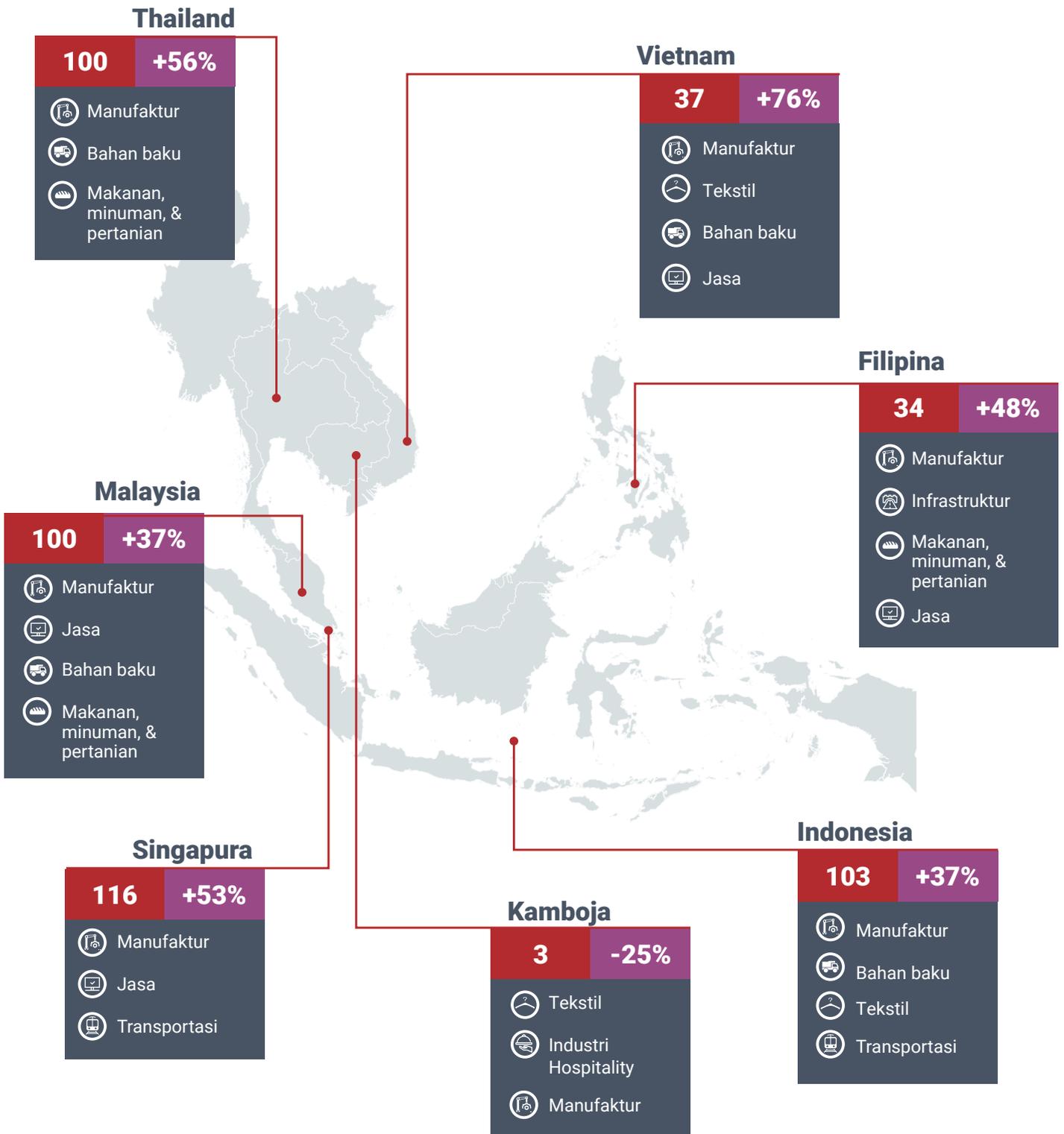
Pengungkapan berperan penting dalam membantu berbagai pemangku kepentingan di ranah alam dan lingkungan untuk melihat gambaran utuh tentang peristiwa yang tengah terjadi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk respons yang efektif. Pengungkapan juga memperlihatkan para pelopor dan pihak yang lamban mengambil tindakan di berbagai sektor dan pasar, sehingga memungkinkan adanya kebijakan dan upaya pelibatan yang lebih tepat sasaran. Di bagian ini, kami merangkum data statistik utama yang diperoleh dari pengungkapan lebih dari 400 perusahaan di Asia Tenggara, dan kesenjangan yang harus segera dituntaskan oleh para pemangku kepentingan. Kami berharap laporan ini akan mempercepat tindakan di berbagai tingkat tata kelola dan aksi lingkungan di kawasan ini.

## Tren angka pengungkapan berdasarkan tema lingkungan<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Sebanyak 35 perusahaan menanggapi permintaan pengungkapan informasi terkait hutan, tetapi hanya 28 perusahaan yang mengungkapkan adanya tindakan untuk sekurangnya satu komoditas yang berisiko terhadap hutan.

**Pengungkapan di Asia Tenggara tahun 2022 berdasarkan Negara<sup>5</sup>**



▼ Pengungkapan tahun 2022  
 ▼ Perubahan dari tahun sebelumnya  
 ▼ Sektor teratas yang melakukan pengungkapan

<sup>5</sup> Laporan ini mencakup pengungkapan perusahaan yang berlokasi di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Negara lain, seperti Brunei, Myanmar, Timor-Leste dan Laos tidak dicakup dalam laporan ini.

# Gambaran umum pengungkapan

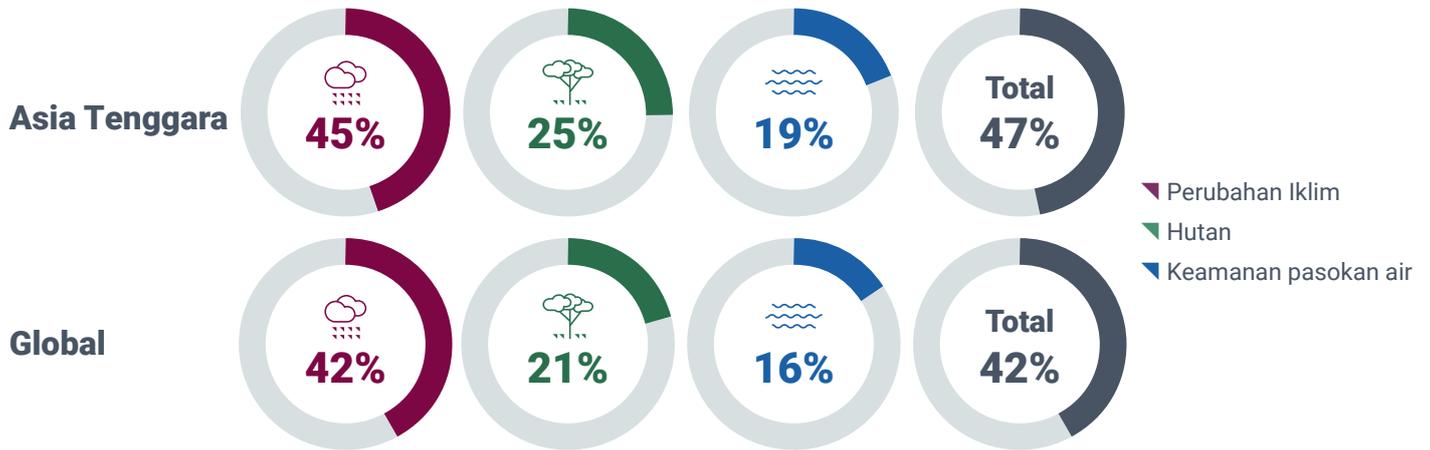
**Pengungkapan informasi lingkungan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat global, tapi juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Asia Tenggara berada di tengah-tengah peluang ini. Aksi lingkungan dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam transaksi dan peluang pertumbuhan bagi perusahaan, yang pada akhirnya menghasilkan lapangan kerja dan nilai ekonomi bagi negara dan mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat. Muncul generasi baru investor yang melakukan investasi dengan bertanggung jawab, yang juga berhati-hati terhadap praktik risiko pencitraan ramah lingkungan (*greenwashing*), dan kerangka pengungkapan yang transparan, komprehensif, dan konsisten membantu memitigasi risiko ini. Pengungkapan tidak hanya membantu mengurangi kekhawatiran investor dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga menyediakan praktik terbaik komparatif yang dapat diterapkan perusahaan ke dalam strateginya guna mencapai keberlanjutan yang lebih luas dan reputasi yang lebih baik.**

Di bagian ini, kami menyoroti gambaran umum dan metrik utama dari pengungkapan perusahaan tahun 2022 yang dapat digunakan investor, perusahaan pembeli, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami tingkat kematangan kinerja lingkungan berbagai perusahaan di Asia Tenggara, dimana terdapat peluang dan keberhasilan, dan di area mana aksi lingkungan masih tertinggal.

## **1 Pengungkapan terkait lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim mengalami peningkatan pesat di Asia Tenggara berkat adanya berbagai regulasi. Di sisi lain, pengungkapan aksi hutan dan keamanan pasokan air masih sangat kurang.**

- ▼ Terdapat peningkatan sebesar 47% dalam jumlah perusahaan di Asia Tenggara yang mengungkapkan informasi lingkungannya ke CDP. Sedangkan dalam tingkat global, peningkatannya mencapai 42%.
- ▼ Hanya 4% atau 20 perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan terkait perubahan iklim, hutan, dan keamanan pasokan air.
- ▼ Jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan terkait hutan masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai target lingkungan global.

Gambar 1: Peningkatan persentase pengungkapan di Asia Tenggara dibandingkan dengan pengungkapan terhadap tiga tema lingkungan pada tahun 2021-2022

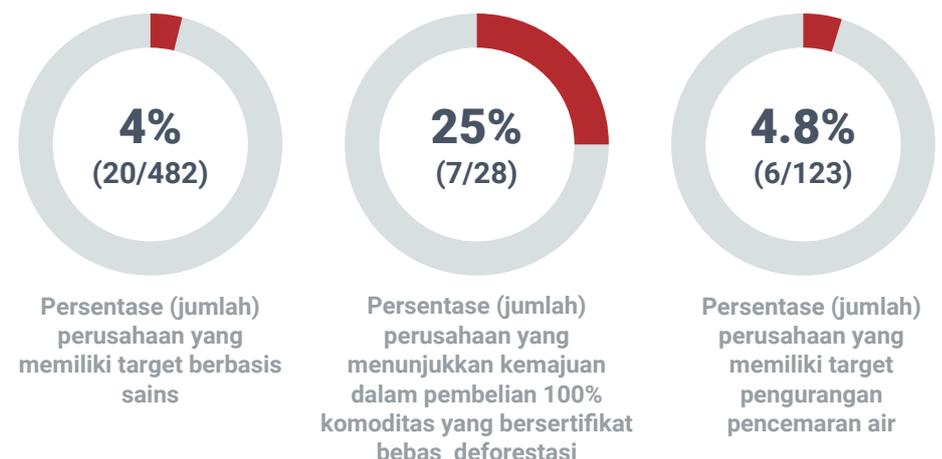


## 2 Hanya 5 perusahaan di Asia Tenggara yang berhasil masuk ke 'daftar A' CDP tahun 2022

- Empat dari lima perusahaan tersebut berkantor pusat di Thailand, dan satu perusahaan di Singapura
- Empat dari lima perusahaan tersebut masuk dalam 'daftar A' Perubahan Iklim, sedangkan tiga perusahaan masuk dalam 'daftar A' Keamanan Pasokan Air.

## 3 Perusahaan di Asia Tenggara masih kurang berambisi untuk membuat komitmen lingkungan.

Gambar 2: Persentase perusahaan yang menetapkan target berbasis sains, target bebas deforestasi, dan target pengurangan pencemaran air



#### 4 Biaya besar yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara akibat kurangnya aksi lingkungan

- Perusahaan di Asia Tenggara memperkirakan bahwa dampak keuangan dari risiko perubahan iklim, hutan, dan keamanan pasokan air lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola berbagai risiko ini.

Gambar 3: Perbandingan perkiraan dampak keuangan dari risiko lingkungan dengan biaya yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut di berbagai tema lingkungan

Combined financial impacts/Costs of responding	
 Risiko terkait perubahan iklim	22 kali lebih sedikit
 Risiko terkait hutan	10 kali lebih sedikit
 Risiko terkait keamanan pasokan air	8 kali lebih sedikit

#### 5 Pelibatan rantai pasok masih dianggap sebagai upaya “yang baik jika dimiliki” bukan upaya yang ‘harus dimiliki’ bagi perusahaan di Asia Tenggara

- Dampak lingkungan dari rantai pasok masih dipandang sebelah mata oleh perusahaan di Asia Tenggara

Gambar 4: Persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan yang melakukan pelibatan pemasok dan memberikan insentif keuangan

	Persentase perusahaan responden yang melibatkan pemasoknya	Jumlah perusahaan responden yang memberikan insentif keuangan kepada pemasok
 Perubahan Iklim	31%	1
 Forests	19%	2
 Keamanan pasokan air	18%	3

# Tema Pengungkapan – Kesalingbergantungan Alam

Dalam subbagian berikut, tren terkait tiga tema lingkungan yang memiliki ketergantungan dengan alam, yaitu perubahan iklim, hutan, dan keamanan pasokan air akan dibahas. Secara umum, sudah dipahami dengan luas bahwa ketiga unsur ini merupakan representasi berbeda dari persoalan pengelolaan lingkungan yang sama, sehingga ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari persoalan yang sama. Bahkan ketika mengupayakan tindak lanjut mengenai pengungkapan terkait perubahan iklim dan komitmen berbasis sains (SBT), kami juga mendorong adanya tindak lanjut terhadap perlindungan hutan dan keamanan pasokan air, terutama di Asia Tenggara. Jika upaya yang di lakukan untuk menangani perubahan iklim belum memadai, upaya yang dilakukan untuk melindungi hutan dan pasokan air masih sangatlah kurang. Ini juga berlaku untuk tema lingkungan lainnya yang belum diintegrasikan ke dalam kerangka pengungkapan CDP. Keadaan inilah yang harus diubah.



## Perubahan Iklim

Meski menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak pemanasan global, Asia Tenggara masih sangat mengandalkan bahan bakar fosil. Meski sejumlah negara di kawasan ini telah menetapkan target nasional untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 sebagai respons terhadap target pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dalam Perjanjian Paris, masih ada negara yang belum mengadopsi komitmen tersebut. Indonesia telah berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, sedangkan Thailand berkomitmen untuk mencapai target tersebut pada tahun 2065. Di sisi lain, Filipina masih belum menetapkan target nol bersih. Permintaan energi di kawasan ini juga diperkirakan akan meningkat sekitar 3% per tahun di antara tahun 2030 hingga 2050<sup>6</sup>. Dekarbonisasi merupakan tantangan besar bagi negara-negara di Asia Tenggara, mengingat pentingnya mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan komitmen keberlanjutan. Tindakan kolektif di tingkat nasional dan tingkat organisasi di Asia Tenggara sangat penting untuk mendorong perubahan yang diperlukan.

## Tata Kelola

Tata kelola merupakan kunci untuk mengelola persoalan terkait perubahan iklim dan mendorong nilai-nilai dari para pengambil keputusan. Dengan meningkatnya tren aturan mengenai pengungkapan terkait perubahan iklim dan kasus litigasi perubahan iklim di Asia

<sup>6</sup> International Energy Agency. (2022). Southeast Asia Energy Outlook 2022. <https://www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2022>.

Tenggara, persoalan perubahan iklim tidak hanya menjadi masalah kepatuhan yang memerlukan pengawasan tingkat dewan, tetapi juga dinilai sebagai risiko yang menimbulkan kerugian finansial. Terdapat perkembangan positif dengan adanya 70% perusahaan yang melakukan pengungkapan di Asia Tenggara yang melaporkan memiliki pengawasan tingkat dewan untuk persoalan terkait perubahan iklim. Namun, kompetensi dewan masih terbatas dan hanya sedikit insentif yang diberikan untuk manajemen yang mengurus persoalan terkait perubahan iklim.

- ▼ Sebanyak 70% perusahaan memiliki pengawasan tingkat dewan untuk persoalan terkait iklim di dalam organisasinya
- ▼ Sebanyak 27% perusahaan memiliki setidaknya satu anggota dewan yang kompeten dalam menangani persoalan terkait perubahan iklim
- ▼ Sebanyak 33% perusahaan memberikan insentif kepada manajemen yang bertanggung jawab mengurus persoalan terkait perubahan iklim

### Strategi

Mengintegrasikan persoalan terkait perubahan iklim ke dalam strategi bisnis akan menentukan arah organisasi dalam menangani tantangan perubahan iklim. Tindakan ini dapat ditunjukkan secara nyata dengan menyusun rencana transisi iklim yang kredibel dan selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C, yang harus diintegrasikan ke dalam strategi bisnis secara menyeluruh. Pada tahun 2022, hanya 18% perusahaan responden yang memiliki rencana transisi iklim yang selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C, dan hanya 18% yang menggunakan analisis skenario perubahan iklim<sup>7</sup>.

Beralih dari bahan bakar fosil dianggap sebagai salah satu strategi utama dalam mencapai emisi nol bersih di Asia Tenggara. Indonesia, Filipina, dan Vietnam merupakan negara di kawasan ini yang paling bergantung terhadap batu bara, dengan tingkat pertumbuhan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, sementara Thailand dan Malaysia memiliki laju pertumbuhan emisi yang sedang. Meski strategi dekarbonisasi yang diterapkan perusahaan bersifat sektoral, pemanfaatan energi terbarukan masih dipandang sebagai salah satu strategi utama untuk diterapkan perusahaan di Asia Tenggara.

<sup>7</sup> CDP also released a global report on climate transition plan "Are Companies Developing Credible Climate Transition Plans?" in February 2023.

- ▼ Sebanyak 18% perusahaan memiliki rencana transisi iklim yang selaras dengan komitmen pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C
- ▼ Sebanyak 18% perusahaan menggunakan analisis skenario iklim untuk mendukung strategi bisnisnya
- ▼ Sebanyak 31% perusahaan memanfaatkan energi terbarukan
- ▼ Sebanyak 5% perusahaan mengidentifikasi belanja/ pendapatan yang selaras dengan transisi perubahan iklim di organisasinya

### Pengelolaan Risiko

Sebagai salah satu kawasan paling rentan terhadap perubahan iklim, Asia Tenggara, yang memiliki garis pantai yang panjang dan dataran rendah yang padat penduduk, menghadapi berbagai macam dampak akibat perubahan iklim. Banjir, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kenaikan muka air laut menjadi tiga dampak perubahan iklim utama di kawasan ini<sup>8</sup>. Berdasarkan Laporan Penilaian Keenam (AR6) Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), bencana banjir menyebabkan peningkatan signifikan terhadap rata-rata kerugian ekonomi tahunan di berbagai kota pesisir, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara antara tahun 2005 dan 2050<sup>9</sup>. Ditambah dengan risiko transisi, kawasan ini diperkirakan akan menderita kerugian ekonomi sekitar 28 triliun dolar AS dalam 50 tahun mendatang akibat minimnya tindakan penanganan perubahan iklim<sup>10</sup>.

Selain itu, meskipun perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan menyadari bahwa dampak keuangan akibat minimnya tindakan penanganan perubahan iklim jauh lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggapi risiko tersebut, tetapi hanya kurang dari separuhnya yang telah mengidentifikasi risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang memiliki dampak keuangan ataupun strategis yang substantif terhadap bisnisnya. Angka ini menunjukkan kurangnya pemahaman perusahaan di Asia Tenggara mengenai dampak yang ditimbulkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

- ▼ Sebanyak 65% perusahaan memiliki proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

<sup>8</sup> Seah, S. et al. (2021). [Southeast Asia Climate Outlook: 2021 Survey Report](#)

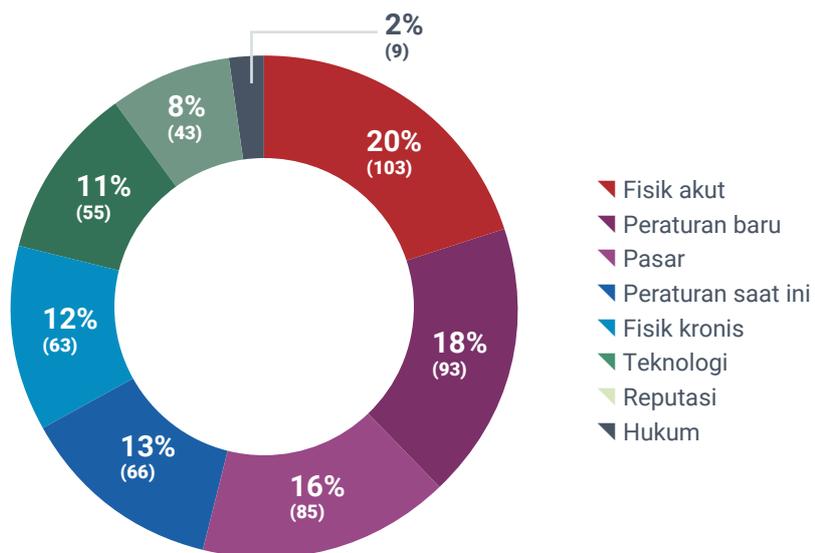
<sup>9</sup> IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*

<sup>10</sup> Deloitte Economics Institute. (2021). *Asia Pacific's turning point: How climate action can drive our economic future*

- ▼ Dari semua perusahaan yang memiliki mekanisme pengelolaan risiko terkait perubahan iklim, 82% di antaranya telah mengintegrasikan proses pengelolaan risiko terkait perubahan iklim ke dalam proses pengelolaan risiko berbagai bidang di seluruh perusahaan. Sementara itu, sisanya (18%) memiliki proses pengelolaan risiko terkait perubahan iklim yang terpisah.
- ▼ Sebanyak 42% perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang memiliki dampak keuangan atau strategi yang substantif terhadap bisnisnya.

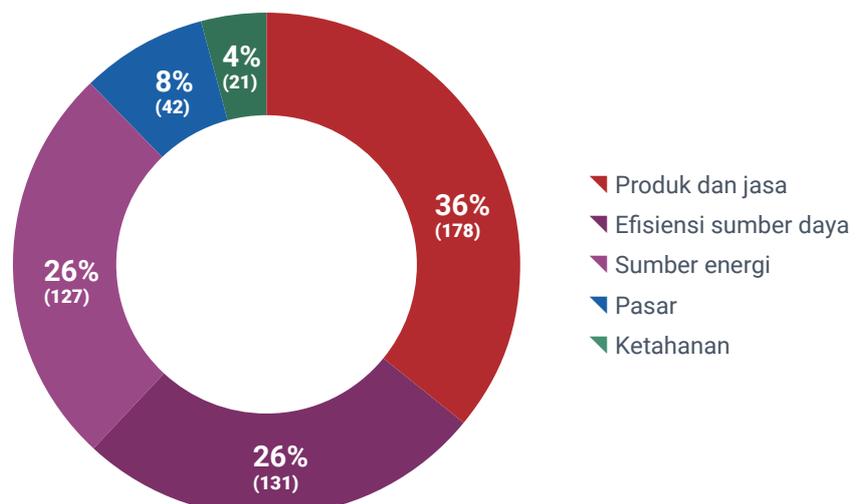
**Tiga risiko tertinggi terkait perubahan iklim yang diidentifikasi adalah risiko fisik akut, risiko peraturan baru, dan risiko pasar.**

Gambar 5: Jenis risiko terkait perubahan iklim yang diidentifikasi oleh perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan tahun 2022



**Tiga peluang teratas terkait perubahan iklim yang diidentifikasi adalah produk dan jasa, efisiensi sumber daya, dan diversifikasi sumber energi.**

Gambar 6: Jenis peluang terkait iklim yang diidentifikasi oleh perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan pada tahun 2022



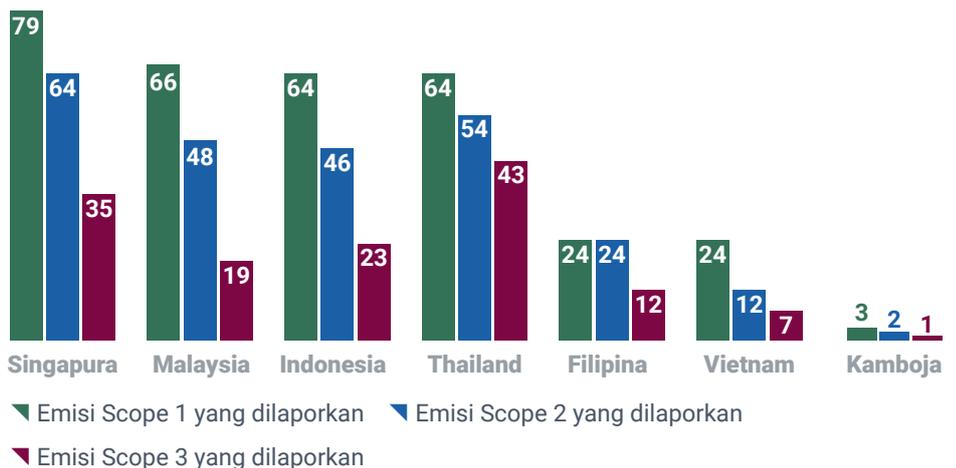
## Metrik dan Target

### Emisi

Data emisi GRK amat penting dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan dalam persoalan terkait perubahan iklim. Pemerintah mungkin akan memperkenalkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat untuk memenuhi komitmen emisi nol bersihnya. Investor harus memiliki ambisi untuk melakukan tindakan terbaik selain mendapatkan keuntungan investasi. Dari data yang dilaporkan, persentase perusahaan di Asia Tenggara yang melaporkan emisi GRK meningkat dari tahun ke tahun. Namun, persentase pelaporan di Asia Tenggara tetap rendah, terutama untuk emisi Scope 3 dan jika dibandingkan dengan pasar negara maju lainnya. Verifikasi emisi GRK, bahkan untuk emisi Scope 1 dan 2, belum menjadi praktik umum sehingga menimbulkan keraguan mengenai kredibilitas dan kelengkapan data yang dilaporkan organisasi. Gabungan kedua hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam penilaian dan pemantauan kemajuan target emisi nol bersih, dan kami mengharapkan adanya peningkatan di masa mendatang.

- ▼ Sebanyak 68% perusahaan melaporkan emisi Scope 1.
- ▼ Sebanyak 52% perusahaan melaporkan emisi Scope 2.
- ▼ Sebanyak 29% perusahaan melaporkan sekurangnya satu kategori emisi Scope 3.
- ▼ Sebanyak 18% perusahaan memverifikasi emisi Scope 1.
- ▼ Sebanyak 17% perusahaan memverifikasi emisi Scope 2.
- ▼ Sebanyak 12% perusahaan memverifikasi sedikitnya satu kategori emisi Scope 3.

Gambar 7: Uraian jumlah perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan emisi Scope 1, 2 dan 3 di tahun 2022

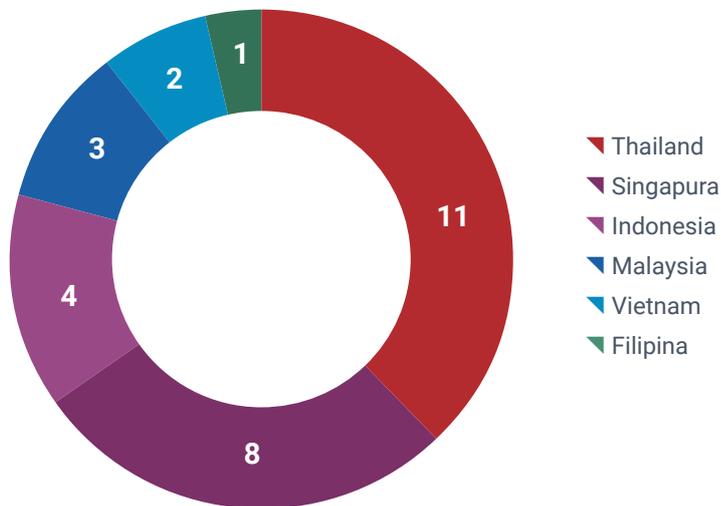


## Target

Target menunjukkan ambisi dan merupakan tanda kesiapan dan kematangan untuk bertransisi. Berdasarkan data yang dilaporkan, saat ini hanya kira-kira separuh perusahaan yang melaporkan memiliki target pengurangan emisi yang dijalankan secara aktif. Selain itu, hanya sebagian kecil perusahaan yang targetnya ditinjau atau disetujui oleh SBTi. Penetapan SBT dapat menunjukkan kekuatan dan kredibilitas target pengurangan emisi suatu perusahaan, dan dianggap sebagai praktik terbaik dalam penetapan target.

- ▼ Sebanyak 49% perusahaan memiliki target emisi yang dijalankan secara aktif pada tahun pelaporan.
- ▼ Sebanyak 6% perusahaan memiliki target yang ditinjau atau disetujui oleh SBTi.

**Gambar 8: Jumlah perusahaan responden Asia Tenggara tahun 2022 yang targetnya telah ditinjau atau disetujui oleh SBTi berdasarkan negara**



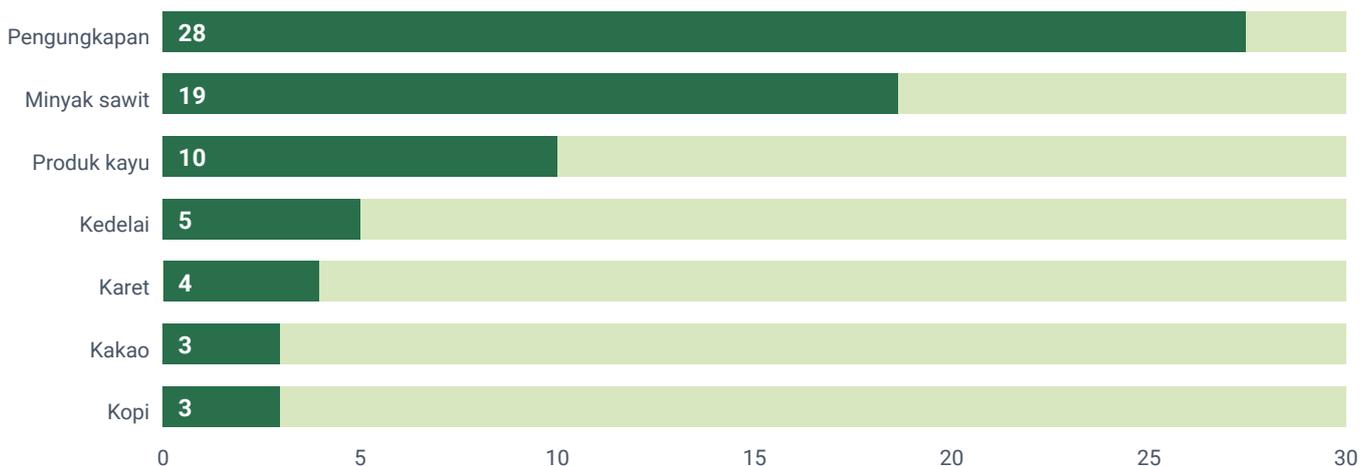


## Hutan

Asia Tenggara memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia dan merupakan pusat keanekaragaman hayati penting<sup>11</sup>. Meski demikian, kawasan hutan yang luasnya lebih besar dari Jerman telah hilang antara tahun 1990–2020<sup>12</sup> akibat konversi hutan secara permanen menjadi lahan perkebunan untuk beragam komoditas, misalnya sawit, karet, tebu, dan pohon penghasil pulp<sup>13</sup>.

Perubahan yang positif mulai terlihat. Sebagai contoh, peningkatan komitmen dan kondisi iklim yang mendukung telah mengurangi hilangnya hutan primer selama lima tahun terakhir di Indonesia. Namun, perubahan ini saja belum cukup. Untuk mencapai komitmen global tanpa deforestasi pada tahun 2030, diperlukan adanya percepatan tindakan yang ambisius. Selain itu, komitmen emisi nol bersih tidak akan tercapai tanpa menghentikan deforestasi dan konversi lahan. Setidaknya 68% emisi Scope 3 yang dihasilkan perusahaan barang konsumen disebabkan perubahan pemanfaatan lahan<sup>14,15</sup>. Hal ini menjadi alasan Science Based Target initiative for Forest, Land use, and Agriculture (SBTi FLAG) menetapkan prasyarat untuk penerapan komitmen tanpa deforestasi/tanpa konversi lahan sebagai bagian dari penetapan target<sup>16</sup>.

**Gambar 9: Jumlah perusahaan di Asia Tenggara yang memberikan pengungkapan informasi beragam jenis komoditas yang berisiko terhadap hutan tahun 2022**



<sup>11</sup> Hughes, A. (2017). Understanding the drivers of Southeast Asian biodiversity loss. <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecs2.1624>

<sup>12</sup> FAO. Global Forest Resources Assessment. <https://fra-platform.herokuapp.com/>

<sup>13</sup> Mongabay. (2015). Industrial concession causing massive deforestation in Cambodia. <https://news.mongabay.com/2015/08/land-concessions-responsible-for-large-scale-deforestation-in-cambodia/>

<sup>14</sup> Hershey. (2021). 2021 ESG Report. [https://www.thehersheycompany.com/content/dam/hershey-corporate/documents/pdf/hershey\\_2021\\_esg\\_report.pdf](https://www.thehersheycompany.com/content/dam/hershey-corporate/documents/pdf/hershey_2021_esg_report.pdf)

<sup>15</sup> Nestle. (2021). Nestle net zero roadmap. <https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-12/nestle-net-zero-roadmap-en.pdf>

<sup>16</sup> Science Based Targets. (2022). The SBTi's FLAG Guidance: A groundbreaking moment for addressing land-related emissions. <https://sciencebasedtargets.org/blog/the-sbtis-flag-guidance-a-groundbreaking-moment-for-addressing-land-related-emissions#:~:text=Deforestation%20is%20responsible%20for%2010,without%20stopping%20all%20land%20conversion>

### Tata kelola hutan

Menetapkan dan menerapkan komitmen tanpa deforestasi yang menyeluruh dan berjangka waktu merupakan langkah awal dalam membangun rantai pasok komoditas yang etis untuk melindungi hutan. Komitmen ini menunjukkan apresiasi perusahaan terhadap persoalan terkait hutan dan menunjukkan kesediaannya untuk bertindak. Perusahaan yang memberikan pengungkapan pada tahun 2022 menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan, meskipun perlu adanya penguatan komitmen dan perluasan cakupan kebijakan.

- ▼ Sebanyak 79% perusahaan memiliki kebijakan terkait hutan, tetapi hanya 43% yang melaporkan kebijakan tanpa deforestasi di tingkat perusahaan untuk komoditas tertentu dengan menyertakan unsur-unsur sosial dan remediasi, yang tersedia secara publik.
- ▼ Sebanyak 71% perusahaan memiliki komitmen publik terkait hutan, tetapi hanya 4% yang melaporkan komitmen tanpa deforestasi/ tanpa konversi lahan terikat waktu dan terukur yang selaras dengan praktik terbaik<sup>17</sup>.

### Mengelola risiko terkait hutan

Isu-isu terkait hutan telah mendapatkan perhatian secara global. Pada tahun 2021, ada 145 negara, termasuk 20 negara Asia Pasifik, berkomitmen untuk menghentikan deforestasi dan degradasi lahan serta memulihkannya pada tahun 2030<sup>18</sup>. Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biodiversity/CBD), hampir 200 negara menjamin sekurangnya 30% perlindungan alam di Bumi pada tahun 2030<sup>19</sup>. Komitmen ini cukup menjanjikan, meskipun dari perspektif perusahaan, perubahan kebijakan ini menimbulkan risiko keuangan mengingat adanya potensi aset terdampar (stranded assets) dan risiko dalam mengakses pasar.

<sup>17</sup> Companies with a public no-deforestation (no-conversion of natural ecosystems, zero gross deforestation/no-deforestation) forests-related commitment with social elements, remediation and restoration that is timebound, set to be completed by 2030, includes a cut-off date before 2020, with Free, Prior, Informed Consent (FPIC), covers 100% of production/consumption and applies to all relevant operations. Includes commitments to operations in accordance with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, remediate any adverse impacts on indigenous people and local communities, adoption of the UN International Labour Organization principles, resolution of complaints and conflicts through an open, transparent and consultative process, recognition of legal and customary land tenure rights, restoration and compensation to address past deforestation and/or conversion.

<sup>18</sup> UN Climate Change Conference. (2021). Glasgow leaders' declaration on forests and land use. <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>

<sup>19</sup> Convention on Biological Diversity. (2022). Kunming-Montreal Global biodiversity framework. Draft decision submitted by the President. [https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf?utm\\_campaign=COP15+daily+briefing+-+19+Dec&utm\\_medium=email&utm\\_source=autopilot](https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf?utm_campaign=COP15+daily+briefing+-+19+Dec&utm_medium=email&utm_source=autopilot)

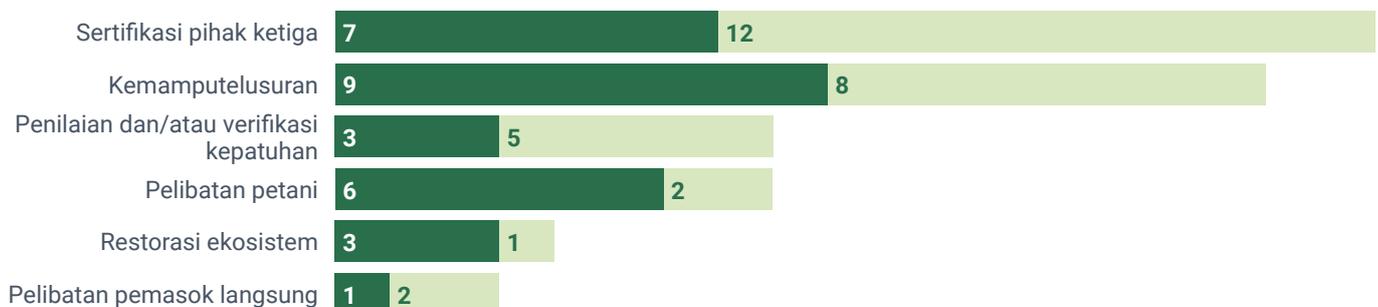
- ▼ Ada 91% perusahaan yang menerapkan penilaian risiko terkait hutan, tetapi hanya 4% yang melaporkan penilaian risiko menyeluruh berdasarkan praktik terbaik<sup>20</sup>.
- ▼ Sebanyak 82% perusahaan mengidentifikasi sekurangnya satu risiko yang kemungkinan berdampak besar terhadap bisnisnya.
- ▼ Sebanyak 39% perusahaan melaporkan risiko terkait hutan dengan nilai mencapai **2,26 miliar dolar AS**, tetapi hanya sebagian kecil perusahaan yang mengungkapkan informasi keuangan, dan diketahui bahwa potensi dampak keuangan ini diestimasi terlalu rendah. Di sisi lain, biaya untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi diperkirakan hanya sebesar **223,5 juta dolar AS**.

#### Target terkait hutan dan pelaksanaannya

Target harus ditetapkan guna memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan komitmen. Pelaporan kemajuan secara berkala berdasarkan target yang telah ditetapkan memungkinkan perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau upaya perusahaan dalam membangun rantai pasok tanpa deforestasi dan tanpa konversi lahan.

- ▼ Meskipun 79% dari total perusahaan melaporkan target terkait hutan, hanya 57% yang menetapkan targetnya selaras dengan komitmen tanpa deforestasi/tanpa konversi lahan, baik yang berkaitan dengan kemamputelusuran, sertifikasi, kepatuhan, pelibatan pemasok, atau restorasi ekosistem.

**Gambar 10: Jenis target terkait hutan yang dilaporkan oleh perusahaan di Asia Tenggara yang memberikan pengungkapan tahun 2022**



- ▼ Tidak diselaraskan dengan komitmen tanpa deforestasi/tanpa konversi
- ▼ Diselaraskan dengan komitmen tanpa deforestasi/tanpa konversi

<sup>20</sup> Perusahaan yang melakukan penilaian risiko terkait hutan yang menyeluruh: penilaian lengkap yang mencakup seluruh operasi yang relevan dengan memperhitungkan risiko dalam 6 tahun mendatang dan ketersediaan komoditas yang berisiko terhadap hutan, dampak kegiatan terhadap kondisi ekosistem dan habitat, dampak sosial, dan masyarakat setempat.

- ▼ Hanya 25% perusahaan dengan target untuk membeli 100% komoditas bersertifikat tanpa deforestasi pada tahun 2030 yang menunjukkan kemajuan atas target ini, sedangkan 36% lainnya melaporkan telah membuat kemajuan dalam mencapai target kemamputelusurannya<sup>21</sup>.

### Tindakan kolektif dalam rantai pasok komoditas

Pencapaian kemamputelusuran yang memadai merupakan komponen penting dalam membangun dan mengelola rantai pasok yang etis. Sebagai contoh, penelusuran asal komoditas hutan hingga tingkat kota atau daerah administrasi yang setara merupakan praktik minimum yang diharapkan. Skema sertifikasi yang memiliki kriteria tanpa deforestasi/tanpa konversi lahan dan sistem lacak balak dengan volume yang telah bersertifikat secara fisik hingga ke titik asal, juga dapat digunakan untuk mencapai kemamputelusuran yang seharusnya<sup>22</sup>.

- ▼ Meskipun 86% perusahaan memiliki sistem kemamputelusuran sekurangnya untuk satu komoditas, hanya 54% yang melaporkan bahwa pihaknya mampu menelusuri sekurangnya 90% volume produksi/konsumsi setidaknya hingga ke tingkat kota atau wilayah administrasi yang setara tanpa pengecualian.
- ▼ Sebanyak 68% perusahaan melakukan sertifikasi untuk sejumlah volume komoditasnya, tetapi hanya 4% yang melaporkan bahwa sekurangnya 90% volume dari salah satu komoditasnya telah bersertifikat dengan skema sertifikasi yang memberikan jaminan tanpa deforestasi/tanpa konversi.

Komitmen yang berdampak positif terhadap hutan (forest positive) dan emisi nol bersih juga makin mendapat perhatian. Untuk mencapai komitmen ini, perusahaan harus mengurangi dampak yang ditimbulkannya terhadap hutan dan lahan dengan melindungi hutan, ekosistem alami, dan masyarakat setempat secara memadai, sebagai bagian dari upayanya.

<sup>21</sup> These involve tracing 100% of at least one commodity supply back to the municipality or equivalent level at a minimum.

<sup>22</sup> Accountability Framework. Traceability. <https://accountability-framework.org/the-framework/topics/traceability/>

- ▼ Sebanyak 68% pengolah, pedagang, perusahaan manufaktur, dan peretail melibatkan pemasok tingkat pertama untuk mendorong tindakan mengatasi persoalan terkait hutan. Sementara di sektor pedagang, perusahaan manufaktur, dan peretail, 64% perusahaan melaporkan pelibatan selain dengan pemasok tingkat pertama
- ▼ Sebanyak 74% perusahaan bekerja sama dengan petani, tetapi hanya 48% yang menawarkan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung petani bertransisi menuju produksi komoditas berkelanjutan

### Tindakan bersama untuk menghentikan deforestasi

Penyusunan pendekatan lanskap/yurisdiksi<sup>23</sup> dalam ekosistem produksi menawarkan peluang bagi perusahaan untuk menghindari deforestasi, mengurangi emisi akibat perubahan pemanfaatan lahan, dan meningkatkan pengelolaan pasokan air di wilayah terkait.

- ▼ Sebanyak 18 perusahaan berpartisipasi dalam inisiatif lansekap ini yang sebagian besar berlokasi di Indonesia (misalnya, Provinsi Riau, Aceh, dan Kalimantan Barat) dan Malaysia (misalnya, Johor dan Sabah)

Mengurangi deforestasi dan merestorasi lahan terdegradasi dapat mendorong hingga sepertiga potensi mitigasi risiko perubahan iklim yang dibutuhkan pada tahun 2030 untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dan memastikan emisi nol bersih global pada pertengahan abad ini<sup>24</sup>. Meski demikian, kuantitas dan kualitas tindakan pelestarian hutan yang dilakukan perusahaan di Asia Tenggara masih belum memadai. Perusahaan harus mempercepat upayanya dalam menjamin perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati. Upaya ini dapat dicapai dengan menetapkan dan memperkuat kebijakan dan komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Pembangunan di Lahan Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE), meningkatkan ambisi melalui penetapan target, dan memastikan pelaksanaan tindakan yang tegas. Dalam melakukan tindakan perlindungan dan restorasi hutan, perusahaan tidak hanya meningkatkan komitmen keberlanjutannya, tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati, tindakan penanganannya perubahan iklim, dan masyarakat setempat. Melalui peningkatan transparansi dan tindakan, semua pihak akan merasakan manfaat keuangan, lingkungan, dan sosial.

<sup>23</sup> CDP. (2021). [Collective Action: Corporate Engagement in Landscape and Jurisdictional Approaches](#)

<sup>24</sup> World Economic Forum. 2022. Forests for Climate: Scaling up Forest Conservation to Reach Net Zero. [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_Forests\\_for\\_Climate\\_2022.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forests_for_Climate_2022.pdf)



**Di Asia Tenggara, Indonesia adalah penyedot air terbesar ke-9 dunia<sup>29</sup>. Jakarta sebagai ibu kota adalah kota yang paling cepat tenggelam di dunia dikarenakan oleh kenaikan permukaan air laut, konstruksi di atas lahan yang rawan subsidensi, dan ketergantungan pada penggunaan sumur pompa air tanah sebagai sumber pasokan air. 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut<sup>30</sup>.**

## **Ketahanan Air**

Asia Tenggara sangat rentan terhadap perubahan iklim dengan berbagai macam dampak terkait pasokan air, termasuk kenaikan tinggi muka air laut, banjir, badai, siklon tropis, dan kekeringan. Berbagai negara di kawasan ini menduduki peringkat paling rentan terhadap bencana alam, yang telah menelan biaya lebih dari 86 miliar dolar AS per tahun dan memaksa 69,2 juta orang meninggalkan kediamannya dalam rentang tahun 2010 dan 2021<sup>26</sup>.

Menurut Laporan Khusus IPCC mengenai Dampak Kenaikan Suhu 1,5°C akibat Pemanasan Global (2018)<sup>27</sup>, Asia Tenggara menghadapi risiko tertinggi di dunia akibat banjir pesisir karena kenaikan permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi curah hujan tinggi, limpasan dan arus air yang tinggi.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan manusia makin memperparah risiko terkait pasokan air, yang berdampak buruk terhadap alam dan mata pencaharian. Misalnya, pembangunan bendungan besar di sepanjang Sungai Mekong telah menyebabkan banjir dan kekeringan yang tidak terprediksi serta menurunnya jumlah pasokan ikan yang berdampak terhadap 60 juta orang di Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam<sup>28</sup>.

Karena perubahan iklim dan kegiatan manusia terus mengancam keamanan pasokan air di Asia Tenggara, maka sektor swasta harus menempatkan pengelolaan air sebagai bagian penting dari strategi bisnisnya, demi menjaga ekosistem alam, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

<sup>25</sup> United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). (2020). The Disaster Riskscape across South-East Asia: Key Takeaways for Stakeholders. ST/ESCAP/2885.

<sup>26</sup> Asian Development Bank. (2022). [Disaster Displacement in Asia and the Pacific: A Business Case for Investment in Prevention and Solutions](#).

<sup>27</sup> Cambridge University Press. (2022). [Global Warming of 1.5°C IPCC Special Report on Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels in Context of Strengthening Response to Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty](#), pp. 175 - 312

<sup>28</sup> The Third Pole. (2021). What are the impacts of dams on the Mekong river?. <https://www.thethirdpole.net/en/energy/what-are-the-impacts-of-dams-on-the-mekong-river/>

<sup>29</sup> United Nations. (2022). The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater: Making the invisible visible. <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022>

<sup>30</sup> Adi Renaldi. (2022). Indonesia's giant capital city is sinking. Can the government's plan save it?. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/indonesias-giant-capital-city-is-sinking-can-the-governments-plan-save-it>

## Kebijakan dan Tata kelola

Guna mencapai masa depan yang positif bagi alam dengan pasokan air yang aman, pemerintah, lembaga keuangan, dan pimpinan perusahaan memerlukan komitmen yang lebih kuat terhadap target penghematan air dengan menerapkan mekanisme kebijakan yang sesuai dan mengarahkan modalnya agar tidak membiayai kegiatan bisnis yang boros air dan menimbulkan pencemaran. Mewajibkan pengungkapan pasokan air dapat membantu pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang matang untuk mendukung dan berinvestasi dalam teknologi dan praktik berkelanjutan yang meningkatkan pengelolaan air sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya normalisasi pengungkapan perubahan iklim, momentum untuk mewajibkan pengungkapan pengelolaan air juga meningkat di seluruh dunia, dan pembuat kebijakan di Asia Tenggara juga menunjukkan ketertarikannya untuk menyertakan informasi terkait pasokan air dalam inisiatif pengungkapan wajib dan sukarela<sup>31</sup>.

Filipina menjadi yang terdepan dalam upaya ini, dengan mengenalkan persyaratan pengungkapan air wajib paling lengkap di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2019, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina menjelaskan lebih lanjut persyaratan pengungkapan dalam Panduan Pelaporan Keberlanjutan bagi Perusahaan Terdaftar, yang mencakup metrik pemanfaatan air, dampak utama bisnis terhadap operasi langsung dan rantai pasok, dan kebijakan untuk mengelola dampak, risiko, dan peluang. Malaysia, Singapura, dan Indonesia juga telah mengenalkan atau tengah berupaya mengenalkan metrik pasokan air ke dalam persyaratan pengungkapan lingkungannya.

- ▼ CDP sudah mengoperasikan satu-satunya mekanisme pengungkapan air perusahaan global di dunia sejak tahun 2009 dan menjadi standar utama dalam kerangka pengungkapan pasokan air perusahaan
- ▼ Pengungkapan data air berbagai perusahaan di Asia Tenggara mengalami peningkatan hampir empat kali lipat selama lima tahun terakhir dan terus menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menjanjikan pada masa mendatang seiring menguatnya peraturan yang berlaku

<sup>31</sup> CDP's recent policy brief "[Setting the high-water mark for mandatory disclosure](#)" contains examples in a comprehensive analysis of global water reporting regimes as well as a set of recommendations for developing a robust water disclosure framework.

### **Pengelolaan Risiko**

Dengan adanya kepastian mengenai risiko air, perusahaan, dan investor dapat mulai menerapkan penilaian risiko pasokan air untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membuat keputusan strategis guna memitigasi dan meminimalkan paparan risikonya. Data dari perusahaan yang memberikan pengungkapan tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang mengakui risiko fisik, risiko peraturan, dan risiko reputasi terkait pasokan air yang melekat dalam operasinya, dan biaya yang ditimbulkan jika risiko ini diabaikan.

- ▶ Sebanyak 69% perusahaan telah menjalankan penilaian risiko terkait pasokan air, meningkat dari 60% pada tahun sebelumnya
- ▶ Sebanyak 29% perusahaan melaporkan risiko terkait pasokan air dengan perkiraan nilai mencapai 1,33 miliar dolar AS, delapan kali lebih tinggi dibandingkan dengan biaya untuk menangani risiko ini sebesar 157 juta dolar AS
- ▶ Risiko fisik akut merupakan jenis risiko teratas yang teridentifikasi, baik dari segi frekuensi maupun potensi dampak keuangan kumulatif, yang tercantum dalam 67% respons dengan estimasi total dampak sebesar 1,21 miliar dolar AS

Dengan tingginya dampak keuangan tersebut, sudah jelas bahwa perusahaan harus melakukan penilaian risiko pasokan air dan merespons berbagai risiko yang teridentifikasi. Perusahaan harus bertindak sekarang juga, atau berisiko menanggung biaya yang lebih besar di kemudian hari.

### **Metrik dan target (dengan fokus terhadap pencemaran)**

Pada tahun 2022, berbagai perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan, menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan dengan meningkatnya integrasi pengelolaan air ke dalam prioritas bisnisnya. Sebagian besar perusahaan memiliki target terkait pasokan air yang dipantau di tingkat perusahaan.

Secara global, upaya perusahaan untuk mengatasi persoalan air sebagian besar difokuskan terhadap kuantitas air, dengan target terkait pengambilan dan penggunaan air paling banyak dilaporkan. Namun, kesadaran dan tindakan di kalangan perusahaan terkait pentingnya kualitas air dan perlunya upaya mengatasi pencemaran air masih kurang.

- ▀ Sebanyak 61% perusahaan memiliki target terkait pasokan air yang dipantau di tingkat perusahaan, naik dari 59% pada tahun sebelumnya
- ▀ Hanya enam perusahaan (atau kurang dari 5%) yang memiliki target terkait upaya pengurangan pencemaran
- ▀ Sebanyak 40% perusahaan tidak memantau kualitas pembuangan air yang sesuai dengan parameter standar efluen

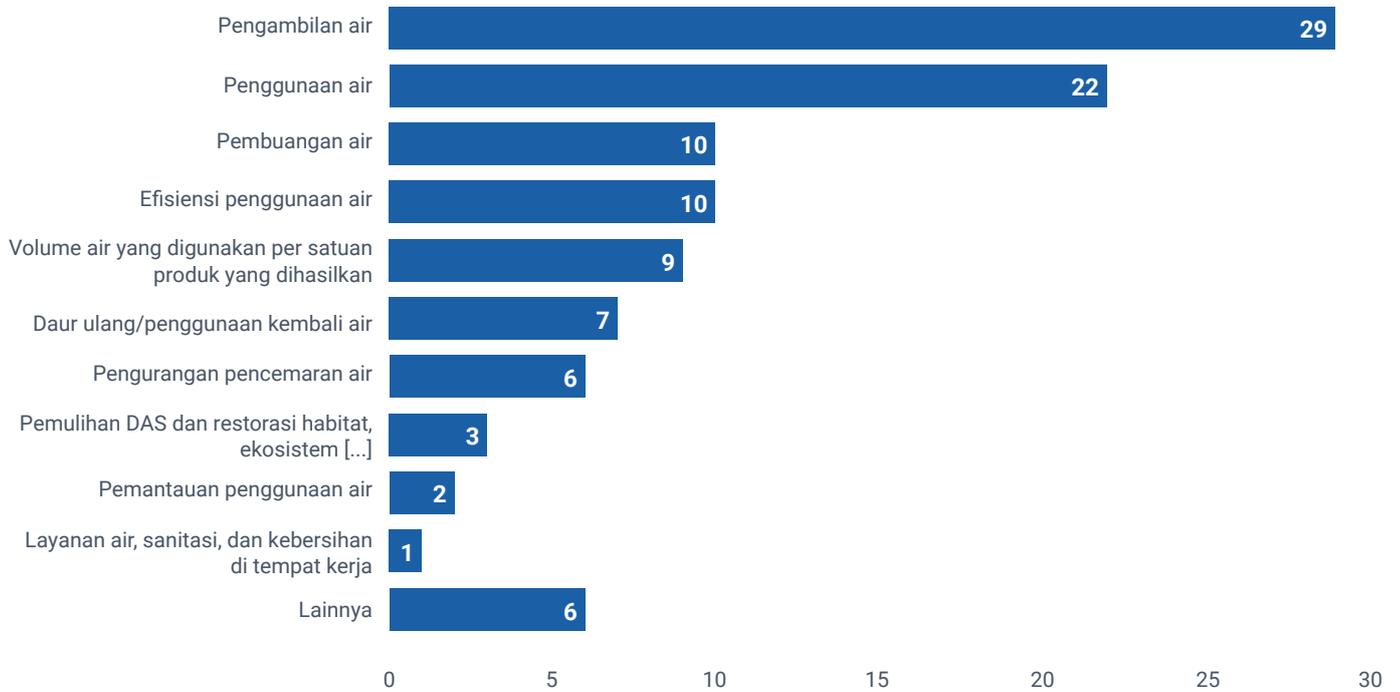
Berbagai bukti sudah di depan mata. Laporan Bank Dunia tahun 2019 tentang kualitas air dunia menyebutkan buruknya kualitas air yang sebagian besar disebabkan kegiatan industri mengancam pertumbuhan ekonomi, membahayakan kesehatan masyarakat, dan mengganggu ketahanan pangan. Banyak dampak pencemar baru yang tidak diketahui dan dapat menimbulkan bahaya lebih besar dari yang telah diperkirakan terhadap sumber daya air yang sudah menipis<sup>32</sup>. Asia Tenggara telah diidentifikasi sebagai titik rawan eutrofikasi akibat penggunaan pupuk yang berlebihan di industri makanan dan minuman, terutama di Indonesia yang produksi minyak sawitnya meningkat 25 kali lipat dalam 50 tahun terakhir.

Berbagai masalah ini diuraikan lebih lanjut dalam gambar 12. Sektor yang paling banyak menimbulkan pencemaran, misalnya makanan, minuman, dan pertanian, bahan bakar fosil, serta manufaktur dan bahan baku, diketahui memiliki praktik pemantauan efluen yang tidak memadai.

Perusahaan di Asia Tenggara perlu berupaya lebih keras untuk mengatasi masalah kualitas air dan melakukan tindakan yang melampaui pendekatan rutin seperti biasa (*business-as-usual*) jika ingin memastikan pertumbuhan bisnis berkelanjutan di era sumber daya air yang semakin terancam. Pencemaran atau hilangnya sumber daya air ini berdampak terhadap alam. Perusahaan harus melakukan upaya lebih besar untuk memanfaatkan peluang guna memastikan pengolahan air limbah yang efektif dan efisien, serta menghilangkan atau mengurangi pencemar dalam produknya.

<sup>32</sup> The World Bank. (2019). Quality Unknown: The Invisible Water Crisis. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/08/20/quality-unknown>

**Gambar 11: Berbagai jenis target terkait pasokan air yang dipantau di tingkat perusahaan sepanjang tahun 2022 oleh perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan**



Gambar 12: Jumlah perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan tahun 2022 yang tidak memantau parameter standar efluen dalam pembuangan airnya

Industri Primer	Water Impact Index – Klasifikasi Pencemaran	Jenis Kegiatan Industri	Perusahaan yang Tidak Memantau Parameter Standar Efluen dalam Pembuangan Air (di Asia Tenggara)
 Makanan, minuman, & pertanian	Kritis	Minuman, pengolahan makanan, pengolahan minyak sawit	4
 Bahan bakar fosil	Kritis	Ekstraksi minyak dan gas	2
 Infrastruktur	Tinggi	Jaringan listrik	1
 Manufaktur	Sangat tinggi	Plastik, produk karet dan kertas, komponen logam fabrikasi, komponen dan peralatan elektronik, perangkat keras komputer, kontainer dan pengemasan, semikonduktor, pembuatan kapal	31
 Bahan baku	Kritis	Plastik, aluminium, pulp dan kertas, bahan kimia	5
 Retail	Sedang	Toserba	1
 Jasa	Rendah/Tidak relevan	Jasa teknik, telekomunikasi, Dana Investasi Real Estat/REIT	3
 Jasa transportasi	Sedang	Angkutan laut, logistik	2
<b>Total: 49</b>			
(40% perusahaan yang melakukan pengungkapan)			

## Ringkasan pengungkapan berdasarkan tema alam

Aspek	Perubahan iklim	Hutan	Pasokan air
<b>Tata Kelola</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 70% perusahaan memiliki pengawasan tingkat dewan untuk persoalan terkait perubahan iklim</li> <li>2 Sebanyak 27% perusahaan sekurangnya memiliki satu anggota dewan yang kompeten dalam menangani persoalan terkait perubahan iklim</li> <li>3 Sebanyak 33% perusahaan memberikan insentif kepada manajemen yang bertanggung jawab menangani persoalan terkait perubahan iklim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 91% perusahaan memiliki pengawasan tingkat dewan untuk persoalan terkait hutan</li> <li>2 Sebanyak 39% perusahaan memiliki setidaknya satu anggota dewan yang kompeten dalam menangani persoalan terkait hutan</li> <li>3 Sebanyak 71% perusahaan memiliki kebijakan yang tersedia secara publik yang mencakup isu-isu terkait hutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 76% perusahaan memiliki pengawasan tingkat dewan untuk persoalan terkait pasokan air</li> <li>2 Sebanyak 25% perusahaan sekurangnya memiliki satu anggota dewan yang kompeten dalam menangani persoalan terkait pasokan air</li> <li>3 Sebanyak 24% perusahaan memberikan insentif kepada manajemen yang bertanggung jawab menangani persoalan terkait pasokan air</li> <li>4 Sebanyak 40% perusahaan memiliki kebijakan terkait pasokan air yang terdokumentasi dan tersedia untuk umum</li> </ol>
<b>Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 18% perusahaan memiliki rencana transisi yang sejalan dengan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C</li> <li>2 Sebanyak 18% perusahaan menggunakan analisis skenario untuk menyampaikan strategi bisnisnya</li> <li>3 Sebanyak 5% perusahaan mengidentifikasi pengeluaran/pendapatan yang selaras dengan transisi iklim organisasinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 68% perusahaan mengintegrasikan isu-isu berkaitan dengan hutan kedalam perencanaan keuangan, tujuan jangka panjang bisnis, dan strategi jangka panjang perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 55% perusahaan mengintegrasikan persoalan terkait pasokan air ke dalam tujuan bisnis jangka panjangnya</li> <li>2 Sebanyak 20% perusahaan menggunakan analisis skenario untuk menyampaikan strategi bisnisnya</li> <li>3 Sebanyak 20% perusahaan memiliki produk dan jasa yang berdampak rendah terhadap pasokan air</li> </ol>
<b>Pengelolaan risiko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 65% perusahaan memiliki proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko dan peluang terkait perubahan iklim</li> <li>2 Sebanyak 42% perusahaan mengidentifikasi risiko terkait perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang cukup besar terhadap bisnisnya</li> <li>3 Sebanyak 42% perusahaan mengidentifikasi peluang terkait perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang besar terhadap bisnisnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 91% perusahaan melakukan penilaian terkait hutan</li> <li>2 Sebanyak 82% perusahaan mengidentifikasi risiko terkait hutan yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang besar terhadap bisnisnya</li> <li>3 Sebanyak 71% perusahaan mengidentifikasi peluang terkait hutan yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang besar terhadap bisnisnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebanyak 69% perusahaan melakukan penilaian risiko terkait pasokan air</li> <li>2 Sebanyak 50% perusahaan mengidentifikasi risiko terkait pasokan air yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang besar terhadap bisnisnya</li> <li>3 Sebanyak 53% perusahaan mengidentifikasi peluang terkait pasokan air yang berpotensi menimbulkan dampak keuangan atau strategis yang besar terhadap bisnisnya</li> </ol>

Aspek	Perubahan iklim	Hutan	Pasokan air
Target	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sebanyak 49% perusahaan memiliki target emisi yang diterapkan secara aktif pada tahun pelaporan, baik target intensitas ataupun target mutlak</li> <li><b>2</b> Hanya 6% perusahaan yang targetnya telah ditinjau atau disetujui oleh SBTi</li> <li><b>3</b> Dari semua perusahaan yang memilih SBTi dalam target emisi mutlaknya (baik disahkan oleh SBTi maupun dinyatakan secara mandiri), hanya 61% perusahaan yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sebanyak 57% perusahaan memiliki target berkaitan dengan hutan yang berhubungan dengan komitmen tanpa deforestasi.</li> <li><b>2</b> Sebanyak 29% memiliki target ketertelusuran terkait dengan komitmen tanpa deforestasi.</li> <li><b>3</b> Sebanyak 43% perusahaan memiliki target sertifikasi pihak ketiga yang berhubungan dengan komitmen tanpa deforestasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sebanyak 61% perusahaan memiliki target dan/atau sasaran yang dipantau di tingkat perusahaan</li> <li><b>2</b> Kurang dari 5% perusahaan yang memiliki target pengurangan pencemaran air</li> </ol>

# Langkah selanjutnya

Walaupun sejumlah perusahaan dan investor yang ada di balik layar mulai menyadari risiko terkait perubahan iklim, kedua pihak ini belum menyadari paparan risiko terkait alam yang dihadapi sejumlah industri dan perusahaan tempatnya menanamkan investasi.

David Craig,  
Wakil Ketua TNFD

Kemajuan tindakan tidak hanya dibatasi oleh pola pikir kita untuk menolak perubahan. Saat ini, dunia menghadapi kekurangan kuantitas dan kualitas data yang diperlukan untuk membantu upaya yang dilakukan, serta lemahnya pemahaman yang holistik bahwa tindakan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan alam seharusnya dilakukan bersamaan, guna memastikan adanya nilai tambah dan mengurangi konsekuensi yang tidak diharapkan. Pengungkapan lingkungan merupakan langkah yang diperlukan untuk mendorong tindakan yang lebih terukur. Pengungkapan ini memberi informasi yang diperlukan untuk memahami kompleksitas lingkungan dan perubahannya, serta menunjukkan adanya tindakan yang belum dilakukan secara maksimal. Perusahaan dalam Daftar "A" CDP tengah memimpin upaya ini. Meski demikian, setiap perusahaan memiliki peran yang harus dijalankan, baik dalam mencapai target emisi nol bersih, mengurangi laju deforestasi, atau mengurangi pencemaran air.



# Lampiran

## Jumlah pengungkapan berdasarkan industri tahun 2022

### Perubahan Iklim

Negara/ Industri													Total
Kamboja	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
Indonesia	13	1	3	9	0	2	22	17	2	7	11	13	100
Malaysia	0	1	6	2	0	4	60	8	1	1	11	4	98
Filipina	1	0	4	0	0	6	7	2	3	3	5	2	33
Singapura	1	0	4	2	1	4	56	3	2	7	23	10	113
Thailand	1	2	10	4	1	3	39	19	3	4	9	3	98
Vietnam	4	2	0	0	0	0	22	3	0	2	3	1	37
<b>Grand total</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>207</b>	<b>52</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>482</b>

### Hutan

Negara/ Industri							Total
Indonesia	5	2	0	1	3	0	11
Malaysia	6	0	1	2	0	0	9
Filipina	0	0	1	0	0	1	2
Singapura	4	0	0	1	0	2	7
Thailand	1	1	0	2	1	1	6
<b>Grand total</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>35</b>

### Keamanan pasokan air

Negara/ Industri													Total
Indonesia	1	1	2	0	0	0	2	6	2	0	1	0	15
Malaysia	0	1	3	0	0	1	25	3	0	0	1	0	34
Filipina	0	0	1	0	0	4	1	0	1	1	0	1	9
Singapura	0	0	5	0	0	2	15	0	0	1	1	1	25
Thailand	0	0	5	4	1	1	20	6	1	0	0	0	38
Vietnam	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
<b>Grand total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>123</b>

- Tekstil  
 Bioteknologi, layanan kesehatan, & farmasi  
 Makanan, minuman, & pertanian  
 Bahan bakar fosil  
 Industri Hospitality  
 Infrastruktur  
 Manufaktur  
 Bahan baku  
 Pembangkit listrik  
 Retail  
 Jasa  
 Jasa Transportasi

# Hubungi Kami

## Penulis

Kelly So  
Erica de Souza  
Rini Setiawati  
Rida Nurafati  
Matthias Ong

Dengan dukungan luar biasa dari Tim CDP (Aidan Rowell, Dennis Wan, Maria Tsolaki, Fitriannisa Soegiharto, Dedy Mahardika, dan Thomas Renaldy)

Kami ucapkan terima kasih kepada South Pole yang telah bekerja sama dengan CDP dalam penyusunan dan publikasi laporan ini.

## CDP Asia Tenggara dan Oseania

The Great Room  
Afro Asia  
63 Robinsons Road,  
Singapore 068894  
sea@cdp.net

## Pertanyaan seputar media

Fitriannisa Soegiharto  
Communications Manager, CDP  
fitriannisa.soegiharto@cdp.net

Carly Youd  
Regional Marketing Lead, APAC, South Pole  
c.youd@southpole.com

## Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba internasional yang menjalankan sistem pengungkapan lingkungan di dunia bagi perusahaan, kota, negara bagian, dan wilayah. Didirikan pada tahun 2000 dan bekerja sama dengan lebih dari 680 lembaga keuangan dengan aset lebih dari 103 triliun dolar AS, CDP merupakan pionir yang menggunakan pasar modal dan rantai pasok perusahaan untuk memotivasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya, dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan perlindungan sumber daya air, dan melindungi hutan. Hampir 20.000 organisasi di seluruh dunia mengungkapkan datanya melalui CDP pada tahun 2022, termasuk lebih dari 18.700 perusahaan yang bernilai setengah dari kapitalisasi pasar global, dan lebih dari 1.100 kota, negara bagian, dan kawasan. CDP yang sepenuhnya sejalan dengan TCFD memegang kumpulan data lingkungan terbesar di dunia dan skor CDP banyak digunakan untuk mendorong keputusan penanaman modal dan pengadaan dalam mencapai ekonomi dengan emisi nol bersih, berkelanjutan, dan berketahanan. CDP adalah anggota pendiri inisiatif Science Based Targets initiative, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda, dan Net Zero Asset Managers.

Kunjungi situs web [www.cdp.net](http://www.cdp.net) atau ikuti Twitter kami di @CDP untuk informasi lebih lanjut.

## Tentang South Pole

South Pole, yang diakui oleh Forum Ekonomi Dunia sebagai Perusahaan Sosial, telah menjadi garda terdepan dalam program dekarbonisasi sejak tahun 2006. South Pole saat ini memiliki tim yang terdiri lebih dari 1.200 tenaga ahli keberlanjutan di 37 lokasi di enam benua. Dengan platform Climate Solutions yang digagasnya, South Pole menyusun dan melaksanakan strategi komprehensif untuk mengubah tindakan perubahan penanganan iklim menjadi peluang bisnis jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah, dan organisasi di seluruh dunia. South Pole juga merupakan pengembang proyek terkemuka dan telah memberikan pendanaan iklim untuk hampir 1.000 proyek di lebih dari 50 negara guna mengurangi lebih dari satu gigaton emisi CO2 yang memenuhi standar industri tertinggi untuk melakukan sertifikasi pengurangan emisi. Berbagai proyek ini juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat kurang beruntung, terutama yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kunjungi [southpole.com](http://southpole.com) atau ikuti Twitter kami di @SouthPoleGlobal untuk informasi lebih lanjut.